

ANCAMAN KEAMANAN MANUSIA: SEPAK TERJANG TALIBAN MENGUASAI AFGHANISTAN

Hanindya Ratih Febriana

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Singaperbangsa Kerawang

Email: 2010631260004@student.unsika.ac.id

Abstract

The Taliban is a movement that originated from a group of madrasa students in Kandahar. The lack of concern for the plight of the Afghan people from the Mujahideen led to the emergence of this movement. The Mujahideen camp was only preoccupied with gaining power by fighting and constantly attacking each other. The formation of the Taliban movement had a positive goal, namely to fight corruption and improve security, but turned into a negative because they applied the harsh teachings of Islam in their own way and applied Islamic law which was brutal enough to cause human rights violations and forced women in Afghanistan to be bear the brunt of the Taliban regime. After the Taliban took control of Afghanistan, the only Sunni Islamic country that had a Shariah legal basis was Afghanistan. From these problems, of course the question will arise why and how the Taliban movement emerged in Afghanistan, then what is the impact of the Taliban movement in Afghan and how the Taliban movement can threaten the security of Afghan society.

Keywords: *Taliban, human rights, Afghanistan, human security*

PENDAHULUAN

Gerakan nasionalis Islam Sunni pendukung Pashtun atau yang biasa dikenal sebagai Gerakan Taliban merupakan sebuah kelompok yang terbentuk sejak tahun 1994 dan secara efektif telah menguasai 90% wilayah Afghanistan sejak tahun 1996 hingga 2001. Gerakan ini mendapatkan dukungan dari Pakistan dan Amerika Serikat. Sejak itu Taliban telah menguasai 4 kota utama di Afghanistan dari total 5 kota yaitu Kandahar, Jalalabad, Herat dan Kabul, oleh karenanya Taliban dilihat sangat mampu merebut kekuasaan secara cepat. Akibat ketidakstabilan situasi politik dan runtuhnya rezim Soviet pada tahun 1990-an, membuat kelompok ultrakonservatif ini semakin berkembang pada tahun 1990-an. Selama tahun 1990-an, perempuan dipaksa untuk berpakaian sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Taliban dan Taliban menolak hak persamaan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu ketakutan besar lainnya, Afghanistan juga dijadikan

sebagai tempat pelatihan terorisme. Pemerintahan Taliban dengan kegigihannya berjanji akan mematuhi kesepakatan dengan Amerika Serikat secara penuh dan mencegah organisasi ataupun kelompok lain menggunakan Afghanistan sebagai basis serangan kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Taliban mengatakan tujuannya bahwa dalam penerapan pemerintahannya yang tidak akan menimbulkan ancaman bagi negara lain, namun banyak para analis yang memprediksi bahwa Taliban dan Al-Qaeda sulit untuk dipisahkan karena keduanya sangat terikat dan terlibat dalam kegiatan pelatihan (Tempo.com).

Ideologi Deobandi Konservatif yang digabung dengan adat istiadat Pashtun yang dianut oleh Taliban membuatnya menerapkan berbagai kebijakan yang sangat kontroversial ketika berkuasa. Hal tersebut sangat ditentang oleh masyarakat Afghanistan yang juga dikecam oleh dunia internasional. Dewan keamanan PBB juga mengecam tindakan yang

dilakukan oleh gerakan tersebut karena berdampak buruk bagi masyarakat Afghanistan, sehingga Taliban dituduh melakukan aksi pelanggaran HAM di Afghanistan. Jika dipandang dari kebijakan-kebijakan dan pandangan-pandangan politiknya yang berbasis Islam, masyarakat tentu akan memberikan pendapat bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan secara revolutif telah menggantikan aturan tradisional masyarakat Afghanistan yang telah dipakai sejak lama. Dengan segala aturan yang telah diterapkan oleh Taliban, pemerintahannya telah mengumumkan bahwa syariat Islam telah diterapkan ke seluruh kawasan Afghanistan dibawah kekuasaannya dan karena itu pada 26 September 1996 menetapkan Kabul sebagai ibukota Afghanistan, akan tetapi basis gerakan politik dan pertahanan tetap berada di Kandahar yang dipimpin oleh Mullah Omar. Kekuasaan Taliban di Afghanistan tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain kecuali Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi karena penegakan hukum Taliban dinilai melanggar Hak Asasi Manusia, oleh sebab itu AS dan PBB memberi berbagai bantuan pada masyarakat Afghanistan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Taliban (Joseph J. Collins, 2018).

Awalnya gerakan Taliban juga mendapatkan dukungan dari masyarakat Afganistan dengan harapan kembalinya stabilitas nasional setelah perang antar suku sesama milisi mujahidin yang telah terjadi sejak tahun 1992 sampai 1996. Setelah berakhirnya perang dengan Uni Soviet, Afghanistan berada pada periode transisi pemerintah yang menimbulkan ketidakpastian akan masa depan Afghanistan sehingga dibangunlah sistem pemerintahan yang berlandaskan Islam tradisional oleh Taliban dan memberikan paham Sunni Deobandi yang memiliki garis geneologi sekte Wahabi. Berbagai pemimpin muslim di dunia

mengecam kebijakan Islam yang diterapkan Taliban sebagai tindakan penyimpangan, khususnya dalam hak-hak masyarakat Afghanistan. Bahkan Iran dan Mesir yang juga memiliki pemerintahan Islam, bersama dengan pemerintahan barat serta organisasi internasional yang menyangkut hak asasi manusia menyerapahi pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh pemerintahan Taliban.

Menurut Taliban, penerapan hukum Islam telah membentuk suatu identitas bagi Afghanistan. Maka gerakan Taliban sejak awal sudah melancarkan berbagai perwujudan tradisionalitas dengan semangat Islam yang menjadi fokus utamanya. Kemenangan Taliban diperkirakan sangat mengancam kehidupan masyarakat yang membuat Afghanistan harus mengalami krisis kemanusiaan, khususnya bagi kaum perempuan dan anak perempuan.

KERANGKA TEORI

Ancaman keamanan seringkali dikaitkan dengan teori sekuritisasi, berkaca pada teori sekuritisasi yang dicetuskan oleh Barry Buzan dan kawan-kawan, bahwa suatu isu dapat menjadi masalah keamanan sebab aktor-aktor yang mengatakan bahwa isu tersebut menjadi ancaman eksistensial bagi suatu kelompok. Oleh sebab itu, tanggapan masyarakat mengenai suatu isu masalah keamanan akan tergantung pada pemimpinnya, apakah mengadopsi pandangan hubungan internasional yang berpusat pada negara atau pandangan liberal yang termasuk masalah keamanan manusia. Konsep keamanan manusia berhubungan dengan hal-hal seperti mata pencaharian dan pembangunan manusia. Konsep ini memberikan pemahaman bahwa kedamaian tidak hanya milik negara atau masyarakat saja, tetapi juga bagi setiap anggota dari komunitas (Kofi, 2001). Konsep keamanan mempunyai tujuan sebagai kajian tentang keamanan

nasional yang bersifat militeristik, sehingga perkembangan studi keamanan mulai merangkul isu-isu tradisional, salah satunya hak asasi manusia (Booth, 1991).

Ancaman keamanan terbagi menjadi 2 yaitu keamanan tradisional yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuatan militer dan keamanan non-tradisional yang menganggap bahwa tindakan keamanan harus terdapat perlindungan bagi nilai-nilai masyarakat, bukan hanya mencakup perlindungan fondasi negara dari ancaman luar. Nilai-nilai tersebut yang harus diperhatikan adalah pengakuan atas hak asasi manusia, oleh karena itu hal ini dipandang sebagai jaminan keamanan non-tradisional. Dalam pendekatan non-tradisional, konsep keamanan menekankan pada kepentingan keamanan para pelaku bukan negara (*non-state actors*) sehingga setelah menurunnya ancaman militer terdapat peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia. Konsep keamanan mulai menanggapi pentingnya *human security* dan tidak lagi hanya terfokus pada negara. Keamanan manusia ini diartikan sebagai suatu kondisi dimana manusia terbebas dari perasaan takut dan bertindak sesuai apa yang diinginkan dalam artian sesuai hak-haknya sebagai manusia. Konsep ini keamanan manusia memiliki ciri khas yaitu menurutnya ancaman utama bagi keamanan manusia ialah penolakan hak-hak asasi manusia dan tidak adanya supremasi hukum (Widjanto, 2006).

Dalam hal ini, pada masa kekuasaan Taliban tahun 1996-2001 dianggap merampas hak-hak masyarakat Afghanistan untuk hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Masyarakat Afghanistan merasa sengsara dan tidak cocok dengan penerapan syariat Islam yang keras dan ketat sehingga menyebabkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Taliban seperti melarang kebebasan dalam berekspresi, larangan menonton TV, larangan menikmati musik,

larangan menonton film di bioskop, perempuan dilarang keluar rumah untuk bekerja dan mengenyam pendidikan, mengeksekusi hukuman mati didepan publik untuk terpidana pembunuhan dan perzinahan, amputasi bagi yang melakukan pencurian, kaum pria juga diharuskan memanjangkan jenggot dan kaum perempuan wajib mengenakan pakaian sangat tertutup/*burka*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asal Mula Gerakan Taliban di Afghanistan

Taliban merupakan sekumpulan pelajar agama dari madrasah-madrasah Islam di Pakistan yang berada di daerah Pashun di Afghanistan. Taliban diartikan sebagai gerakan yang mengacu pada gerakan politik yang muncul pada tahun 1994 akibat dari runtuhnya rezim komunis Afghanistan dan hancurnya tatanan sipil di Afghanistan. Gerakan Taliban ini didirikan oleh Mullah Muhammad Omar pada tahun 1994 akibat dari kekecewaannya terhadap Afghanistan dimana hukum Islam belum bisa diterapkan pasca jatuhnya pemerintahan komunis dan memuncaknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan serta banyaknya kasus pemerkosaan yang menyebabkan Afghanistan mengalami ketidakstabilan. Munculnya Gerakan Taliban di tahun 1994 dianggap sebagai respons dari kegagalan kelompok Afghanistan untuk mengakhiri perang dan membentuk pemerintahan yang lebih damai. Madrasah-madrasah yang berada di Afghanistan merupakan kunci utama dari kemunculan Taliban yang bermula dari provinsi arah Selatan. Milisi pertama Taliban yang berhasil di Kandahar hingga tahun 1996 adalah karakteristik dari Madrasah di Afghanistan selatan, di mana pendidikan Islam yang disediakan oleh madrasah adalah unit mobilitas sosial sejati yang memberikan peluang bagi pelajar Afghanistan untuk

meningkatkan keterampilan pendidikan mereka. Hal ini dibuktikan dengan munculnya Taliban.

Kemudian setelah para Mujahidin mampu mengusir Uni Soviet dari Afghanistan dan mulai menguasai Kabul, pemerintahan Burhanuddin Rabbani secara tidak langsung melupakan dan mengabaikan keberadaan madrasah yang ada sejak awal peperangan sebagai perantara yang menjaga kekuatan moral sosial dan keamanan Afghanistan, hal ini yang membuat Mujahidin melakukan tindakan anarki sebagai penguasa dan menguasai seluruh wilayah Afghanistan sehingga Afghanistan runtuh atas partai-partai Mujahidin dan membuat Taliban muncul kembali sebagai gerakan yang memberantas degradasi moral yang menawarkan keamanan yang sejak awal datang dari kalangan madrasah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Gerakan Taliban tumbuh dalam lingkungan madrasah Afghanistan selatan yang kemudian diperbesar melalui reputasinya dengan kenyataan adanya perlawanan yang bermula dari para pelajar madrasah Afghanistan yang menjadikan hal tersebut sebagai legitimasi Taliban akan awal perjuangannya, madrasah dapat membuktikan kekuatan sosial politiknya atau bahkan militernya dalam peristiwa politik yang terjadi.

Dalam dinamika politik dalam negeri Afghanistan sebelum invasi Soviet di tahun 1980, gerakan politik Islam seperti Taliban bukanlah sebagai kekuatan utama. Pada masa Invasi Soviet barulah para mujahidin dilengkapi dan diberi pelatihan militer dari Amerika Serikat untuk melawan ancaman komunis Soviet. Setelah mundurnya Uni Soviet dari Afghanistan, di tahun 1992 para Mujahidin menyatakan pemerintahan Islam di Afghanistan. Ketidakstabilan politik Afghanistan dan banyaknya pemerintah yang korup membuat Para Mujahidin melakukan aksi dan mengangkat senjata untuk melawan

pemerintah. Pada tahun 1994, Taliban dianggap sebagai kekuatan akan ketertiban sosial di provinsi Afghanistan Selatan. Sejak Januari 1995 Taliban sudah mampu mengendalikan Afghanistan Selatan yang berarti Kabul sudah dekat untuk ditaklukan. Kemudian di akhir tahun 1996, Taliban memperbesar kekuataannya ke Afghanistan Selatan karena mendapat dukungan dari kelompok etnis Pashtun dan mendapat bantuan dari unsur Islam konservatif di luar negeri. Hal inilah yang membuat Taliban semakin menginginkan untuk merebut ibukota yaitu Kabul dan ingin mendapatkan kendali yang efisien dalam menguasai Afghanistan. Kesuksesan yang telah diraih oleh Taliban membuatnya memperbesar target pergerakan melalui operasi-operasi militer dengan misi mengamankan Afghanistan dari degradasi moral.

Akan tetapi di tahun 2001, Taliban sudah mulai menguasai seluruh wilayah Afghanistan terkecuali sebagian kecil Afghanistan Utara. Taliban membuat suatu kebijakan sosial berupa melarang kehidupan publik bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak, tentunya kebijakan ini mendapatkan tentangan dari beberapa negara global. Strategi Taliban adalah untuk menumbangkan, melemahkan, dan mengusir lembaga-lembaga pemerintahan negara, mengisolasi pasukan keamanan Afghanistan, dan membangun lembaga-lembaga paralel yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengaruhnya di seluruh pinggiran Afghanistan. Sesuai dengan Emirat/Imarah Islam Taliban yang mengharapkan pasukan Taliban agar dapat lebih banyak mengendalikan wilayah Afghanistan dalam waktu dekat. Seperti yang dikatakan oleh Emir Mullah Omar kepada para pengikutnya bahwa kinerja Imarah Islam Taliban menjadi lebih kuat secara komparatif. Setelah Kabul dikuasai oleh Taliban, Mullah

Muhammad Omar memimpin pemerintahan Taliban atas Afghanistan. Kemudian Omar membentuk pemerintahan sementara di Kandahar yang mana pembentukan tersebut pertanda akan runtuhnya pemerintahan Rabbani secara sah dan dimulainya periode transisi yang dilanjutkan dengan pemerintahan Taliban.

Dampak Pemerintahan Taliban di Afghanistan

Pada tahun 1996 yang tepatnya 26 September merupakan keberhasilan Taliban menguasai Kabul sehingga munculnya pemerintahan baru yang dibentuk oleh Taliban dan diberi nama Emirat Islam Afghanistan yang dipimpin oleh Mullah Mohammad Omar. Pemerintahan tersebut tidak diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena kurangnya pengakuan dari dunia internasional, sebab Taliban mengabaikan hak asasi manusia dan supremasi hukum. Keadaan sosial Afghanistan berubah secara revolutif karena syariah Islam Taliban diterapkan secara keras dan ketat serta seluruh aturan tradisional Afghanistan dirombak oleh Taliban.

Pada masa transisi kekuasaan antara Taliban dan Afghanistan, sebagian masyarakat Afghanistan merasakan betapa tegasnya penerapan hukum Islam oleh Taliban yang merupakan upaya besar agar mencapai keamanan, masyarakat juga merasakan *culture shock* yang begitu mencolok, khususnya bagi perempuan. Hukum syariah Islam mereka terhadap pakaian perempuan yang mengharuskan untuk menutup seluruh tubuh dengan menggunakan pakaian yang syar'i agar dapat menutupi seluruh tubuh dan wajah, yang boleh terlihat hanyalah bagian mata saja (Musthafa A. R, 2002). Untuk melancarkan penegakan syariah Islam tersebut Taliban membentuk Biro Keagamaan yang disebut Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan membentuk polisi agama untuk mengawasi penegakan

hukum syariah. Mereka berpatroli ke berbagai kota Afghanistan dan bertugas secara brutal karena mereka membawa cambuk dan senjata tembak untuk mencari bukti keterlibatan seseorang dengan rezim sebelumnya atau mencari bukti pelanggaran terhadap peraturan syariah Taliban dengan cara merazia seluruh rumah yang ada disana. Maka dari itu tidak heran jika polisi keagamaan adalah hal yang paling ditakuti di Afghanistan (Ahmed Rashid, 2000). Setiap orang yang berani menunjukkan rasa tidak setuju terhadap Taliban tentunya akan ditangkap, dipukul dan ditahan tanpa toleran apapun.

Hukuman siksaan seperti cambuk diberlakukan untuk para pezina didepan khalayak umum, menurut Taliban hukuman seperti itu dipandang sebagai peristiwa keagamaan. Salah satu tempat untuk melakukan eksekusi dari Taliban terhadap para pelanggar yaitu stadion olahraga yang berada di Kabul. Lain hal dengan kejahatan pencurian yang hukumannya adalah dipotongnya tangan sang pelaku dan bagi yang menyebarkan kebohongan atau fitnah akan diberi hukuman mati serta pelaku homoseksual juga diberi hukuman bakar hidup-hidup di bawah tumpukan batu (Sayed Salahudin, 1998: RAWA).

Kaum perempuan dilarang keras untuk mendapatkan pendidikan dan bekerja, bahkan mereka diharuskan pergi keluar rumah bersama dengan muhrimnya, apabila ada yang tertangkap mata bahwa bepergian dengan bukan muhrimnya ataupun sesama jenis akan diberi hukuman mati (Taufik Adnan Amal, 2004). Bagi Taliban dengan berbagai ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah jatuhnya Afghanistan ke dalam kejahatan dan pelanggaran, namun pada kenyataannya berbagai ketentuan itu membuat kaum perempuan merasakan kesengsaraan yang mendalam. Seperti yang dikatakan oleh Foucault seorang ahli teori sosial bahwa

apabila terdapat relasi pasti ada kekuasaan pula didalamnya, hal ini relevan dengan seluruh kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan yang telah diterapkan oleh Taliban terhadap masyarakat Afghanistan.

Sepak terjang Taliban terhadap Afghanistan di tahun 2001 mengalami hambatan akibat dari rezim Taliban yang melindungi Osama bin Laden yang dikenal sebagai pemimpin Al-Qaeda merupakan tersangka utama dari ledakan bom yang terjadi di Gedung WTC AS atau yang dikenal sebagai peristiwa 9/11 pada September 2001. Hal tersebut menyebabkan rezim Taliban jatuh dengan sendirinya, akan tetapi milisi Taliban bersama dengan pemimpinnya yaitu Omar bersembunyi sembari menyiapkan berbagai strategi dan taktik untuk menyerang dan menguasai Afghanistan kembali.

Sebelumnya, Amerika Serikat bekerja sama dengan sekutu yang berada di wilayah Afghanistan untuk menggulingkan Taliban bersama-sama. Kemudian Amerika Serikat dan Afghanistan menjalin kerjasama strategis untuk menjaga keamanan Afghanistan dan memastikan tidak akan ada kelompok teroris lagi yang akan bernanung di Afghanistan. Amerika Serikat bersama sekutu juga membantu membentuk pemerintahan baru setelah jatuhnya rezim Taliban. Selama masa transisi tersebut, Hamid Karzai ditunjuk sebagai kepala pemerintahan Afghanistan sementara. Namun dengan terbentuknya pemerintahan baru Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat, kisah gejolak berdarah di Afghanistan tidak berakhir begitu. Taliban tidak menyerah untuk tetap merebut kembali Afghanistan dengan melancarkan serangannya melalui serangan bom dan aksi teror agar stabilitas keamanan Afghanistan menjadi terganggu. Awalnya AS menempatkan pasukan di Afghanistan bertujuan untuk memerangi terorisme, tetapi ditengah pergolakan tersebut AS mengubah tujuannya

untuk membantu pemerintahan Taliban merkonstruksi Asgghanistan dalam berbagai aspek, namun tetap menegaskan kepada Taliban agar berhenti melakukan pemberontakan. Dengan upaya yang dilakukan AS, Taliban merasa semakin tertekan sebab tujuan utama Taliban adalah untuk mendapatkan legitimasinya di Afghanistan.

Kemudian, AS melakukan invasi untuk memburu para teroris yang diduga sebagai kelompok Al-Qaeda yang dibantu oleh Taliban di Afghanistan. AS didukung oleh negara anggota NATO untuk melancarkan aksinya dan melindungi Afghanistan dari usaha penaklukan kembali yang dilakukan oleh Taliban, akan tetapi AS bersama NATO memutuskan untuk menarik diri karena sudah cukup banyak memakan korban sipil, militan, pasukan Afghanistan dan tentara AS-NATO sendiri serta hal ini merupakan perang terlama dalam sejarah AS yang memakan banyak biaya dan menewaskan banyak tentaranya sehingga memutuskan untuk meninggalkan Afghanistan. Dalam kurun waktu tiga bulan setelah kepergian NATO dari Afghanistan, Taliban semakin menggencarkan serangannya ke seluruh penjuru Afghanistan dan merebut kota-kota penting di Afghanistan. Bahkan beberapa media pun mengabarkan bahwa Taliban mengepung Kabul dan mengancam posisi pemerintahan Afghanistan yang saat ini dipimpin oleh Presiden Ashraf Ghani.

Omar meyakini bahwa Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban akan menjadi tempat yang makmur dan juga dapat mendorong perkembangan pembangunan ekonomi bagi rakyat Afghanistan. Omar juga mengatakan bahwa Taliban mendukung kemajuan ilmiah dan pendidikan untuk semua masyarakat Afghanistan terutama pada perempuan karena menurutnya pendidikan Taliban harus konsisten dengan kerangka syariah Islam yang berbeda dengan gagasan

pendidikan yang diterapkan oleh negara bagian Barat. Namun pada kenyataannya Antonio Guterres selaku Sekretaris Jenderal PBB mengimbau kepada Taliban untuk menepati janjinya kepada perempuan Afghanistan agar memenuhi kewajiban dan hak pendidikan mereka di bawah hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional.

Meskipun Omar sudah menyatakan bertanggung jawab atas korban sipil dalam perang yang dilakukan untuk merebut kedaulatan Afghanistan, tetapi PBB tetap menyangkan aksi Taliban yang menyebabkan banyak korban sipil dalam perang yang telah terjadi karena pada faktanya Taliban masih membunuh masyarakat Afghanistan hingga saat ini (JOSCELYN, 2014). Omar mengklaim bahwa Emirat Islam telah mendapatkan pengakuan di sebagian besar dunia akibat sistem kerja kantor politik Taliban di Qatar yang melakukan tugasnya dibawah perintah Taliban sehingga banyak kelompok yang awalnya menentang Taliban tetapi sekarang justru datang untuk menyatakan bahwa keberadaan Emirat Islam itu adalah sebuah kenyataan.

Omar meyakini bahwa perang di Afghanistan dapat berakhir ketika seluruh penjajah asing menarik diri dari Afghanistan dan rezim Islam yang ingin diterapkan oleh Taliban dapat berlaku di Afghanistan secara independen. Dengan kata lain kemenangan Taliban bukan karena Afghanistan telah diambil alih melainkan karena komunitas-komunitas internasional telah memutuskan untuk menarik diri dalam membantu Afghanistan dan menghilangkan pandangan dari konflik tersebut.

Terancamnya Hak-Hak Masyarakat Afghanistan

Gerakan Taliban dari para pelajar madrasah terus berkembang di berbagai wilayah Afghanistan dan di setiap wilayah

tersebut mereka menerapkan syariat Islam yang ketat dan keras. Mulanya, setelah Taliban berhasil menguasai 90% wilayah dari Afghanistan membuat masyarakat Afghanistan memiliki harapan baru dengan terciptanya kedamaian. Akan tetapi justru harapan tersebut berbalik menjadi suatu mimpi buruk bagi masyarakat Afghanistan karena terdapat kontroversi terhadap perhatian dunia mengenai pemerintahan Taliban yang cukup keras. Penerapan syariat Islam yang tekstual dimana hukum islam yang diterapkan secara ketat menjadikan masalah bagi mata dunia karena membuat masyarakat Afghanistan menjadi sengsara, terutama terhadap hak-hak anak-anak dan wanita yang terbelenggu serta harus menanggung rezim Taliban ini karena mereka dilarang untuk bersekolah dan melakukan aktivitas diluar rumah yang dianggapnya sebagai suatu hal yang haram. Sehingga satu-satunya tempat yang diizinkan untuk wanita bekerja hanyalah rumah sakit yang harus tetap diawasi oleh polisi syariat Taliban. Taliban berusaha untuk tetap menata ulang kebijakan pemerintahannya dengan membangun kembali rumah sakit dan sekolah, namun di sisi lain Taliban juga menerapkan kebijakan yang absurd dengan mengharamkan anatomi manusia dalam bentuk gambar, lukisan, ataupun patung, melarang perempuan untuk bersekolah dan melarang dokter laki-laki merawat pasien perempuan atau wanita. Dengan kebijakan larangan atas dokter tersebut membuat meningkatnya kematian dari kaum hawa di tahun 1996 karena kekuasaan Taliban.

Sebuah organisasi masyarakat perempuan Afghanistan yang bergerak di Kabul atau dikenal sebagai Revolutionary Association of The Woman of Afghanistan (RAWA) melaporkan bahwa 90% wanita di Afghanistan pada tahun tersebut mengalami depresi berat akibat kekuasaan Taliban yang cukup absurd. Revolutionary Association of

the Women of Afghanistan (RAWA), juga pernah mencatat ribuan kasus pemerkosaan bahkan terhadap anak-anak di Afghanistan selama kekuasaan rezim Islamis ekstrim Taliban dari tahun 1996 – 2001. Sehingga pada saat periode kekuasaan Taliban membuat harapan hidup laki-laki dan perempuan Afghanistan menjadi angka yang terendah di dunia.

Penerapan syariat Islam yang ketat ini juga diterapkan kepada kaum lelaki Afghanistan dimana mereka harus menumbuhkan jenggotnya seperti bewokan dengan syarat ujung rambut jenggot tersebut harus dapat menyentuh dasar sebuah gelas bagi yang melanggar akan ditangkap, dipukuli dan dipenjarakan. Disebuah provinsi di Afghanistan Utara yaitu Faryab, sejumlah 83 laki-laki diberi hukuman akibat dari memangkas jenggotnya sendiri dan ditangkap untuk dibawa ke kantor polisi keagamaan karena memiliki rambut yang panjang, lainnya apabila lelaki yang sudah cukup umur diwajibkan untuk sholat 5 waktu, kalau melanggar akan dihukum cambuk sebanyak 20 kali. Ketika adzan sudah berkumandang, seluruh kendaraan yang berada di jalan harus berhenti, para pengendara harus segera ke masjid terdekat untuk shalat, apabila tidak segera melakukannya akan ditahan seperti dalam siaran radio pada tahun 2001, dilaporkan bahwa polisi keagamaan menahan 21 orang karena tidak melaksanakan shalat berjamaah (Taufik Adnan Amal, 2004).

Sebelum Taliban berkuasa, Afghanistan selalu diributkan mengenai perang antar suku karena sering terjadi perampokan, pemerkosaan dan penjarahan yang tidak bisa ditangani oleh pemerintahan Burhanudin Rabani, sehingga di tahun 1996 Burhanudin Rabani digulingkan oleh Taliban serta Mullah Omar sebagai pemimpin Taliban dengan segera menerapkan hukum islam tersebut dan hukuman yang kerap dilakukan

oleh Taliban sukses membuat ketertiban tetapi justru membuat masyarakat menjadi sengsara. Situasi kemanusiaan pada masa itu tidak kunjung membaik walaupun dengan penerapan hukum syariat Islam tersebut telah memberikan hasil yang baik dalam hal ketertiban dan mengurangi kriminalitas tetapi justru situasi kemanusiaan Afghanistan menjadi semakin suram. Pemerintahan Taliban semakin memperburuk keadaan yang sejak awal memang sudah terlihat menyedihkan. Taliban tidak hanya gagal dalam menyediakan keamanan, bahan pangan dan perlindungan untuk rakyat Afghanistan tetapi juga mengacaukan berbagai upaya dari badan-badan internasional untuk mengirim berbagai kebutuhan untuk masyarakat Afghanistan seperti mengirim bahan makanan dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan. Salah satu dewan badan internasional yaitu PBB mendesak agar Taliban tidak menghalangi jalannya bantuan akan kebutuhan untuk masyarakat Afghanistan, akan tetapi Taliban justru menyalahkan kembali bahwa badan-badan internasional tersebut tidak hanya menawarkan dan memberikan bantuan terhadap masyarakat Afghanistan tetapi juga menyebarkan ajaran agama lain selain Islam sehingga tindakan ini lah yang membuat Taliban enggan menerima dan mendapatkan bantuan dari badan-badan internasional (Efendi, 2003).

Marak terjadinya pelanggaran HAM di Afghanistan seperti pelecehan seksual, larangan mengenyam pendidikan, larangan untuk bekerja, transportasi yang dibatasi, dan rumitnya peraturan dalam berpakaian. Tentu saja masyarakat Afghanistan merasakan ketidaknyamanan dan tertekan dengan berlakunya peraturan baru di negaranya. Pemerintah Taliban sangat membatasi hak-hak perempuan di Afghanistan dari tahun 1996-2001. Sejak berkuasa kelompok Taliban menyatakan berjanji tidak akan membatasi

hak-hak perempuan secara ekstrem. Saat Taliba berkuasa 30 tahun yang lalu secara paksa melarang perempuan untuk bekerja. Dalam praktik membatasi kaum perempuan dalam mengakses sebagian besar pekerjaan, pemerintah Taliban beralih dengan menruti syariat Islam (cnnindonesia.com).

SIMPULAN

Dalam masa pemerintahan Taliban di tahun 1994, pemerintah Afghanistan diubah menjadi Emirat/Imarah Islam Afghanistan, pada saat itu juga banyak terjadi kekerasan sosial terhadap masyarakat Afghanistan dan dicabutnya hak-hak perempuan. Setelah berhasil menaklukkan Afghanistan, Taliban secara langsung merubah peraturan-peraturannya dengan dasar syariah Islam yang lebih ketat. Kaum perempuan yang sebelumnya memiliki pekerjaan yang sangat layak seketika mereka diharuskan untuk berhenti bekerja, sehingga mereka menjadi pengemis demi menafkahi keluarganya.

Kekuasaan Taliban yang represif membuat masyarakat Afghanistan resah dan amat tidak menyukai pemerintahan saat itu serta dunia internasional pun mengecam kebijakan-kebijakannya yang sangat melanggar hak asasi manusia dan mendiskriminasi kaum perempuan. Taliban yang asalnya dari wilayah Pashtun memiliki banyak pendukung karena sebagian besar warga Afghanistan adalah suku Pashtun dan dalam kebudayaan Pashtun sendiri ruang gerak perempuan sangat dibatasi sesuai dengan aturannya, juga pendidikan bagi perempuan dianggap sangat tidak penting sehingga banyak keluarga yang melarang anak perempuannya untuk bersekolah dan mereka dibuat hanya untuk menghabiskan waktunya didalam rumah saja, oleh sebab ini lah perempuan seringkali mengalami tindakan diskriminasi dalam masa pemerintahan Taliban walaupun memang

telah sejak lama diskriminasi terhadap perempuan terjadi.

Selain itu, gerakan nasionalis yang berpegang teguh dengan Islam Sunni ini mayoritas populasinya berada di daerah timur dan selatan Afghanistan, sehingga Taliban menerapkan kebijakan Islam Sunni itu sendiri secara keras. Di tahun 1996, situasi kemanusiaan semakin kacau karena kekerasan, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap masyarakat Afghanistan semakin meningkat, dalam hal ini Taliban melanggar ataupun merebut hak asasi masyarakat Afghanistan yang secara sistematis membuat masyarakat semakin terdiskriminasikan dan terpinggirkan.

Semakin dikecamnya Taliban oleh negara-negara dunia akibat mengancam keamanan manusia membuat Afghanistan semakin banyak yang memberikan dukungan dan bantuan atas situasi tersebut. Di akhir tahun 1990-an, gerakan Taliban telah membantu salah tersangka dari peristiwa 911 yang amat dikejar oleh Amerika Serikat, yang pada akhirnya kekuasaan Taliban di Afghanistan digulingkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2001 akibat dari memberikan perlindungan terhadap Osama bin Laden.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, T. A. (2004). *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Al-Ghiffari, A. A. (2013). *Dinamika Politik Afghanistan pada Masa Pemerintahan Taliban (1996-2001)*. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Ashghor, A. (Agustus 2021). *Taliban di Afghanistan : Tinjauan Ideologi, Gerakan dan Aliansinya dengan ISIS*. *Keamanan Nasional volume VII no. 1*.
- Barry Buzan, O. W. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- BBC. (2021, September 3). *Taliban kembali berkuasa - bagaimana nasib perempuan, HAM, dan kebebasan politik di Afghanistan ke depan?*

- Diakses pada 26 Oktober 2021, dari Tempo:
<https://www.tempo.co/bbc/8984/taliban-kembali-berkuasa-bagaimana-nasib-perempuan-ham-dan-kebebasan-politik-di-afghanistan-ke-depan>.
- Efendi, A. R. (2003). *(Skripsi) Kebijakan Pemerintah Taliban di Afghanistan dalam melindungi Osama bin Laden dari serangan Amerika Serikat*. Jember: Digital Repository Universitas Jember.
- Indonesia, T. C. (2021, September 12). *Di Bawah Kekuasaan Taliban, Sejumlah Wanita Kembali Bekerja*. Diakses pada 25 Oktober 2021, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210912154301-113-693188/di-bawah-kekuasaan-taliban-sejumlah-wanita-kembali-bekerja>
- JOSCELYN, T. (2014, July 28). *Analysis : Mullah Omar addresses governance of Afghanistan*. Diakses pada 18 Oktober 2021, dari Long War Journal: https://www.longwarjournal.org/archives/2014/07/analysis_mullah_omar.php.
- Junita, N. (2021, Oktober 12). *PBB Desak Dunia Internasional Bantu Afghanistan*. Diakses pada 26 Oktober 2021, dari Kabar 24: <https://kabar24.bisnis.com/read/20211012/19/1453199/pbb-desak-dunia-internasional-bantu-afghanistan>
- Khairunnisa, R. A. (2017). Peran United Nations Women dalam Mengakhiri Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan. *Skripsi Universitas Hasanuddin*.
- Kofi, A. (2001, Desember 10). *'WE CAN LOVE WHAT WE ARE, WITHOUT HATING WHAT – AND WHO – WE ARE NOT,' SECRETARY-GENERAL SAYS IN NOBEL LECTURE*. Diakses pada 26 Oktober 2021, dari United Nations Meetings Coverage and Press Releases: <https://www.un.org/press/en/2001/sgsm8071.doc.htm>
- Marga, N. (2021, Agustus 18). *Seberapa Mengancam Kekuatan Taliban Usai Menguasai Afghanistan? Dunia Dibuat Tak Tenang*. Diakses pada 26 Oktober 2021, dari Pikiran Rakyat: <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-012421200/seberapa-mengancam-kekuatan-taliban-usai-menguasai-afghanistan-dunia-dibuat-tak-tenang>.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhnizar Siagian, T. S. (Desember 2018). *Narcoterrorism di Afghanistan : Keterlibatan Taliban dalam Ancaman Keamanan Nontradisional. ICMES Volume 2 no.2*.
- Nafisah, D. (2019). *AFGHANISTAN DI BAWAH PEMERINTAHAN TALIBAN TAHUN 1996-2001 M. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Perang Afghanistan dan Sejarah Taliban yang Kembali Berkuasa*. (2021, Agustus 17). Diakses pada 26 Oktober 2021, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210816220046-118-681330/perang-afghanistan-dan-sejarah-taliban-yang-kembali-berkuasa>.
- Qurtuby, S. a. (2016, Juli 19). *Hijab, Aurat, dan Perkosaan*. Diakses pada 25 Oktober 2021, dari DW: <https://www.dw.com/id/hijab-aurat-dan-perkosaan/a-19402777>.
- Rahman, M. A. (2002). *Afghanistan di Tengah Arus Perubahan : Lapangan dari Lapangan*. Jakarta: Kompas.
- Rashid, A. (2000). *Taliban Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia*. London: Yale University Press.
- Ratriani, V. (2021). *Ini sejarah Taliban, kelompok yang kini menguasai Afghanistan*. Jakarta: Internasional Kontan. Diakses pada 20 Oktober 2021, dari <https://internasional.kontan.co.id>
- Salahuddin, S. (1998, Februari 27). *Taliban flog woman, cut off two men's hands*.

Diakses pada 20 Oktober 2021, dari
RAWA:

<http://www.rawa.org/handcut.htm>

- Wardhana, E. F. (2021). *Sekjen PBB Desak Taliban Tepati Janji pada Kaum Wanita dan Anak Perempuan Afghanistan*. Jakarta: Sindonews. Diakses pada 20 Oktober 2021, dari <https://international.sindonews.com/>.
- Widjajanto, A. (2006). *Human Security*. Makalah.